

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Khoirudin Yakin Pembahasan APBD 2025 Selesai

Gambir, Warta Kota

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menetapkan jadwal Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Pimpinan dewan optimistis, pengesahan APBD murni 2025 dapat dilakukan sebelum Pilkada Jakarta yang digelar 27 November 2024.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Bamus menjadwalkan sidang paripurna untuk penyelesaian APBD 2025, sebelum Pilkada 2024.

Pengesahan itu harus dilakukan melalui penandatanganan antara eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

"Alhamdulillah, rencananya tanggal 26 November, sebelum Pilkada dilaksanakan, kami sudah jadwalkan paripurna untuk penyelesaian APBD 2025," kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Penyusunan APBD 2025, kata Khoirudin, akan diprioritaskan untuk program penanganan banjir dan kemacetan.

Karena itu, politisi PKS ini mendorong Pemprov

DKI melanjutkan program pembuatan embung dan normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir.

"Tentu seperti yang kami kawal juga bersama sebelumnya, pertama masalah banjir, macet ini adalah masalah-masalah Jakarta yang terus mendapat perhatian kita bersama, terutama dari sisi anggaran," ungkap Khoirudin.

Selain itu, program sekolah swasta dan negeri gratis juga akan menjadi prioritas DPRD DKI Jakarta. Tujuannya agar terwujud pemerataan pendidikan.

"Kami usahakan seperti itu, apakah seluruh swasta atau sebagian. Kita lihat kemampuan anggaran kita," ujar Khoirudin.

Pada tahap awal, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta.

Agenda pembahasan terkait penjelasan eksekutif terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 pada Senin (14/10/2024) pukul 10.30 WIB.

Selanjutnya, menggelar rapat kerja komisi-komisi bersama TAPD terhadap KUA PPAS Tahun 2025, Senin (14/10/2024) hingga Kamis (17/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Lalu pada Senin (21/10/2024), pukul 10.00,

menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) ersama pihak eksekutif atau TAPD dengan agenda laporan hasil pembahasan komisi-komisi.

Kegiatan berlanjut dengan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapingab) pada pukul 14.00 WIB.

MoU KUA PPAS

Pada Senin (28/10/2024) pukul 10.00 WIB, DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan MoU KUA PPAS Tahun 2025.

Pada November 2024, DPRD DKI Jakarta akan membahas Raperda tentang APBD DKI Jakarta 2025.

Hari Rabu (7/11/2024) pukul 10.00 WIB, DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Penjabat Gubernur tentang Raperda APBD 2025.

Kemudian Senin (11/11/2024), pukul 10.00 WIB, DPRD DKI Jakarta kembali menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Hari Selasa (12/11/2024) pukul 10.00 WIB, dewan melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan eksekutif atau SKPD.

Rapat kerja itu untuk pendalaman komisi-komisi terhadap Raperda APBD 2025.

Lalu Kamis (21/11/2024), pukul 10.00 WIB, bakal digelar Rapat Kerja Badan Anggaran bersama pimpinan Komisi dan TAPD.

Agendanya terkait penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda APBD 2025, penjelasan eksekutif terhadap Raperda APBD 2025, dan membahas serta merumuskan Raperda APBD 2025.

Pada hari yang sama, pukul 16.00 WIB, dijadwalkan rapat pimpinan gabungan (Rapingab) bersama TAPD. Dengan agenda penelitian akhir dan persetujuan Raperda APBD 2025.

Terakhir, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pada Selasa (26/11/2024) pukul 10.00 WIB.

Agendanya, Penyampaian Laporan Banggar DPRD DKI Jakarta tentang permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

Dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama pimpinan dewan dengan penjabat gubernur DKI Jakarta. Usai penandatanganan, dilangsungkan penyerahan Raperda secara simbolis dan pendapat akhir penjabat gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda APBD 2025. (faf)